BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Latar belakang pengambilan Penelitian ini dikarenakan terdapat Putusan Hakim Kasasi yang sebelumnya pada putusan tingkat pertama pengadilan Negeri Surabaya No. 454/Pid.B/2024/PN.Sby yang memberikan putusan hukuman bebas bagi terdakwa, yang karenanya Putusan tersebut tidak mencerminkan daripada Tujuan Hukum. lalu perkara dilimpahkan ke pengadilan tinggi oleh jaksa penuntut umum untuk upaya Hukum disebabkan tidak adanya nilai keadilan pada putusan pengadilan Negeri Surabaya tersebut. perkara kasasi No. 1466 k/pid/2024 dengan putusan kurungan (5) tahun (6) bulan penjara bagi terdakwa. dalam putusan kasasi (5) tahun (6) bulan bagi terdakwa masih tidak mencerminkan Tujuan Hukum keadilan, kepastian dan kebermanfaatan dengan pertimbangan dakwaan, alat bukti dan akta persidangan.

Dakwaan yang diberikan dalam putusan perkara No. 1466 k/pid/2024 adalah Pasal 338 KUHP Pasal 351 ayat (3) KUHP Pasal 359 KUHP yang diberikan terhadap terdakwa tersebut sangatlah jauh terhadap pembebanan Pidana yang diberikan kepada terdakwa dengan mencerminkan terhadap suatu keadilan, yang ditinjau dari fakta persidangan yang valid. karenanya perbuatan terdakwa yang telah melakukan penaniayaan dan pembunuhan terhadap korban. Hakim dituntut seharusnya memberikan putusan tidak jauh dari apa yang didakwakan atau dituntut oleh penuntut umum yaitu 12 tahun penjara atau bahkan lebih.

Majelis hakim memiliki dasar dalam Putusan kasasi No. 1466 k/pid/2024 yang menyatakan bahwa Majelis hakim dalam memberikan Pertimbangan hukum yang dikeluarkan majelis hakim dengan meyakinkan Terdakwa Ronald Tannur Bersalah dengan melakukan Penganiayaan mengakibatkan kematian dan dijatuhkan Hukuman penjara lima (5) tahun (6) Bulan. Dengan pandangan bahwa Hakim berpandangan karena luka robek majemuk pada organ hati akibat alkohol apalagi sampai adanya dugaan Terdakwa melindas tubuh Dini Sera Afrianti sebagai penyebab meninggalnya Dini Sera Afrianti, lalu saksi-saksi tersebut tidak dapat menerangkan perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, maka muncul konklusi ataupun kesimpulan bahwa Terdakwa tidak mempunyai *mens rea* untuk melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.

Hakim dalam kasus perkara No. No. 1466 k/pid/2024 pertimbangannya menyatakan bahwa hal yang dilakukan terdakwa tidak mencukupi 2 alat Bukti sedangkan ditinjau dari fakta persidangan yang valid. dijelaskan bahwa dasar hukum pada pasal 184 KUHAP yang menyatakan mengenai alat bukti sesungguhnya yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi 2 unsur alat bukti atas keterangan Ahli, saksi dan petunjuk yang dapat menjadikan Hakim untuk memberikan Hukuman yang seadil-adilnya.

Proses peradilan bermuara pada putusan hakim. Persoalan filsafati sangat erat kaitannya dalam profesi hakim yang memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan. Dibandingkan dengan profesi yang lain, hakim sangat memerlukan pemahaman kembali secara utuh terhadap nilai-nilai filsafati dalam kaitannya dengan memeriksa,

mengadili dan menjatuhkan putusannya. Putusan hakim mutlak harus didasarkan pada alasan dan pertimbangan yang mendasar mengapa ia menjatuhkan putusan yang demikian. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan tanpa disertai dengan dasar, alasan dan pertimbangan yang cukup (Frans Limahelu, 2020).

Putusan hakim, pengadilan bisa menggambarkan berbagai asas yang awalnya konseptual menjadi aktual. Dalam hal ini, hakim akan menjalankan penggalian pada berbagai ketetapan yang bisa diaplikasikan pada sebuah kejadian hukum. Hakim menjalankan pembuktian melalui berbagai alat bukti guna mendapat kepastian dalam sebuah kejadian hukum. Penegakan keadilan tentu membutuhkan peran dari hakim, lantaran dalam memutuskan sebuah perkara (Ganse, 2020).

Putusan yang diberikan dalam kasus perkara tersebut yaitu 5 tahun 6 bulan penjara, tidak sama sekali mencerminkan Tujuan Hukum Keadilan, Kepastian dan Kebermanfaatan haruslah menjadikan dasar pertimbangan bagi hakim dalam memberikan suatu putusan untuk mencerminkan penegakan Hukum yang baik, penegakan Hukum yang baik haruslah melihat nilai-nilai dari tujuan Hukum. dalam pemenuhan tujuan hukum yaitu haruslah berdasarkan kepada pemenuhan nilai keadilan, kepastian dan kebermanfaatan. oleh karena itu dalam segi putusan yang di buat oleh seorang Hakim haruslah berdasar atas tujuan hukum.

Hakim yang setimbang pada seluruh indikator bisa mendorong mereka agar senantiasa mampu memelihara kesetimbangan itu, membuktikan bahwa mereka sudah menjalankan tugas, serta mempunyai kekuasaan yang tak bisa digoyahkan lantaran mahir dalam menjalankan profesinya. Dalam hal ini tujuan yang ditetapkan dalam

tulisan terkait ialah meraih tiap tujuan hukum yang diungkapkan Gustav Radbuch, yakni meraih hasil dari sebuah pandangan hukum hingga terwujudnya kepastian hukum, keadilan, serta kebermanfaatan (Pangestu Ragil, 2024).

Hakim dalam menyelesaikan konflik yang dihadapkan kepadanya harus dapat menyelesaikan secara obyektif berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari eksekutif. Dalam pengambilan keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan hukum keputusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan sendiri (Kusyandi & Yamin, 2020).

Disparitas pemidanaan adalah ketidaksetaraan pidana antara kejahatan yang serupa *same offence* dalam kondisi atau situasi serupa *comparable circumstances*. Setidaknya terdapat dua alasan utama mengapa disparitas putusan menjadi hal yang penting: pertama, disparitas putusan mencederai rasa keadilan masyarakat. Kedua, dalam kondisi yang ekstrem, disparitas putusan bisa terjadi karena adanya transaksi jual-beli putusan. Hal ini dikarenakan hakim mempunyai independensi yang dijamin konstitusi dalam menjalankan otoritasnya. Putusan harus mencerminkan keadilan untuk semua pihak, memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum (Abdurrachman Hamidah, 2020) .

Hukum haruslah ditegakkan tanpa adanya disparitas yang dilakukan oleh penegak hukum. maka sebab itu penulis melakukan suatu penelitian yang berjudul Studi Kasus Putusan Perkara No. 1466 k/pid/2024 Tentang Penerapan Tujuan Hukum Keadilan, Kepastian dan Kebermanfaatan Dalam vonis Hukuman 5 Tahun Terhadap Terdakwa.